

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pada Bab VI ini merupakan penutup dari laporan penelitian, yang terdiri dari uraian mengenai kesimpulan penelitian sesuai dengan pertanyaan dan tujuan penelitian, serta saran dan rekomendasi.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, maka kesimpulan penelitian ini dirumuskan ke dalam 3 (tiga) kesimpulan utama, yakni sebagai berikut:

##### **1. Dampak Perubahan Iklim Pada Wilayah Pesisir Kota Semarang dilihat dari Perspektif Jender**

Dampak perubahan iklim pada wilayah pesisir Kota Semarang yang dalam penelitian ini difokuskan pada terjadinya genangan rob sepanjang tahun telah menyebabkan munculnya kerentanan, baik lingkungan-fisik maupun sosial-ekonomi. Jika dilihat dari perspektif jender, maka paparan dampak perubahan iklim tersebut dirasakan berbeda antara kelompok laki-laki dan perempuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelompok perempuan lebih rentan dari pada laki-laki pada saat terpapar dampak perubahan iklim dengan beberapa bukti temuan sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari jumlah yang terpapar, perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, karena perempuan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, sementara laki-laki lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah.
- 2) Dilihat dari lamanya waktu terpapar, perempuan lebih lama terpapar dari pada laki-laki karena perempuan juga lebih banyak menghabiskan waktu

di dalam rumah untuk menyelesaikan tanggungjawab dan peran domestiknya, sementara laki-laki lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah.

- 3) Dilihat dari beban yang timbul, perempuan menjadi lebih banyak menerima beban, sehingga perempuan memiliki beban ganda (*double burden*) karena mereka harus bertanggungjawab pada urusan domestiknya, tetapi pada saat yang sama juga ikut membantu suami mencari pendapatan tambahan. Beban ini muncul akibat dampak perubahan iklim telah menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat dan pada saat yang sama beban biaya hidup bertambah terutama untuk meninggikan rumah.
- 4) Dilihat dari kesulitan yang dihadapi, perempuan lebih banyak mengalami kesulitan dari pada laki-laki, karena menyelesaikan “pekerjaan” perempuan di dalam rumah akan lebih sulit pada saat terkena rob, seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan merawat anak. Sementara pekerjaan laki-laki di luar rumah tidak secara langsung terkena rob.
- 5) Dilihat dari jumlah penderita penyakit akibat genangan rob, perempuan lebih banyak yang menderita gatal-gatal dari pada laki-laki, karena perempuan lebih banyak dan lebih lama bersentuhan dengan genangan rob.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa perubahan iklim tidak netral jender, karena dampaknya dirasakan berbeda antara kelompok laki-laki dan perempuan. Salah satu penyebabnya adalah karena telah terjadi bias jender di tengah masyarakat, dimana perempuan dikonstruksikan sebagai kelompok jender yang bertanggungjawab pada urusan domestik di dalam rumah, sementara laki-laki bertanggungjawab pada urusan publik di luar rumah.

## **2. Kebijakan Perubahan Iklim di Kota Semarang dilihat dari Perspektif Jender**

Kebijakan perubahan iklim di Kota Semarang, yang dalam penelitian ini difokuskan pada dua dokumen kebijakan, yakni (1). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang 2016 –

2021, dan (2). Dokumen Strategi Perubahan Iklim Terpadu Kota Semarang Tahun 2010 – 2020, maka kebijakan perubahan iklim di Kota Semarang belum responsif jender karena isu-isu jender belum dipertimbangkan secara signifikan di dalam kebijakan tersebut. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pada dokumen RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021 belum mempertimbangkan isu-isu jender secara signifikan. Dari 7 (tujuh) Bab/Bagian hanya terdapat ada dua Bab/Bidang saja yang telah memiliki pertimbangan-pertimbangan jender, dan hal itu pun hanya dengan skor cukup (kurang signifikan), yakni:
  - a) Visi-Misi, Tujuan, dan Sasaran, dengan skor 1 dari skor maksimal 3. Hal ini berarti telah ada pertimbangan terhadap isu-isu jender, akan tetapi belum signifikan.
  - b) Kebijakan Umum dan Program, dengan skor 1 dari skor maksimal 3. Hal ini berarti telah ada pertimbangan terhadap isu-isu jender akan tetapi belum signifikan.
- 2) Pada dokumen Strategi Perubahan Iklim Terpadu Kota Semarang Tahun 2010 – 2020 juga belum mempertimbangkan isu-isu jender secara signifikan. Hanya terdapat dua bagian yang telah mempertimbangkan isu-isu jender, dan hal itu pun hanya dengan skor cukup (kurang signifikan) sebagaimana berikut:
  - a) Gambaran Umum Tentang Perkiraan Dampak dan Resiko Perubahan Iklim, dengan skor 1 dari skor maksimal 3. Hal ini berarti telah ada pertimbangan terhadap isu-isu jender akan tetapi belum signifikan.
  - b) Kebijakan Umum dan Program, dengan skor 1 dari skor maksimal 3. Hal ini berarti telah ada pertimbangan terhadap isu-isu jender, akan tetapi belum signifikan.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan perubahan iklim di Kota Semarang sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021 dan dokumen Strategi Perubahan Iklim Terpadu

Kota Semarang Tahun 2010 – 2020 belum responsif jender karena skor jender nya masih sangat minim. Padahal kebijakan perubahan iklim yang responsif jender sangat penting bagi upaya membangun ketahanan perubahan iklim. Semakin responsif jender suatu kebijakan maka akan menjamin terhadap terakomodirnya kepentingan dan kebutuhan spesifik jender.

### 3. Usulan Model Kebijakan Perubahan iklim Responsif Jender di Kota Semarang

Guna merumuskan kebijakan perubahan iklim yang responsif jender sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan perubahan iklim, maka usulan model ketahanan perubahan iklim dirumuskan dalam tiga komponen utama, yakni:

- 1) **Intervensi**, yakni langkah-langkah campur tangan dari pemerintah untuk mewujudkan ketahanan perubahan iklim responsif jender di Kota Semarang. Langkah intervensi ini dilakukan secara partisipatif yang dimulai dengan: a). Melakukan pengarusutamaan jender dalam kebijakan perubahan iklim, baik pada tahap input, proses, maupun output, dengan memastikan adanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dan adil antara laki-laki dan perempuan. Langkah ini juga perlu dilakukan dengan pembentukan dan optimalisasi peran dari Kelompok Kerja (POKJA) PUG dan Gender Focal Point dengan memasukkan isu-isu perubahan iklim; b). Perumusan secara substantif (*substantial arrangement*), yang terdiri dari analisis data pembuka wawasan, isu-isu jender apa yang harus dipertimbangkan, dan indikator-indikator responsif jender kaitannya dengan kebijakan perubahan iklim; dan c). Perumusan langkah kerja institusional (*institutional arrangement*), yang terdiri dari penyusunan kebijakan dan rencana kedepan dan pengukuran hasil untuk memastikan bahwa kebijakan perubahan iklim di Kota Semarang telah responsif jender. Langkah intervensi harus tetap memegang prinsip perencanaan yang partisipatif. Sebagai penanggungjawab untuk langkah-langkah intervensi ini adalah Pemerintah Kota Semarang;

- 2) **Asistensi**, yakni pemberian bantuan untuk mengurangi kendala-kendala operasional yang muncul di dalam upaya untuk mewujudkan ketahanan perubahan iklim responsif jender di Kota Semarang. Program asistensi ini dapat berupa program bantuan teknis, pemberdayaan masyarakat, dan pendanaan program yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik jender kaitannya dengan dampak perubahan iklim;
- 3) **Penciptaan Kondisi yang Mendukung**, yakni setelah dilakukan intervensi dan asistensi perlu adanya penciptaan kondisi yang dapat mendukung bagi terciptanya ketahanan perubahan iklim responsif jender di Kota Semarang. Kondisi yang mendukung dapat terwujud dengan adanya komitmen dari berbagai pihak, yakni: a). Komitmen pemerintah untuk responsif jender di dalam kebijakan perubahan iklim melalui pendekatan kebijakan yang tidak hanya *state-based*, tetapi juga *community-based*; b). Komitmen anggota masyarakat untuk menghilangkan praktik-praktik bias jender dalam setiap aspek kehidupan, dan memiliki pemahaman perubahan iklim (*climate literacy*); c). Komitmen agensi / pihak-pihak terkait, seperti akademisi, LSM, dan media massa, untuk terus mempromosikan ketahanan perubahan iklim yang responsif jender. Ketiga komitmen tersebut (aparatur pemerintah, anggota masyarakat, dan agensi) merupakan bagian dari kerangka kerja kepengaturan perubahan iklim (*climate governance*), yakni kerangka kerja yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga pemangku lain seperti masyarakat dan agensi. Dengan demikian, penanggungjawab untuk langkah-langkah penciptaan kondisi yang mendukung ini adalah Pemerintah Kota Semarang dan pihak-pihak lain sebagai agensi, yakni akademisi, LSM, dan media.

Berdasarkan ketiga komponen tersebut di atas dan berdasar pada *baseline* kebijakan perubahan iklim yang sudah ada di Kota Semarang, yakni (a). Dokumen Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang

2016 – 2021, dan (b). Dokumen Strategi Perubahan Iklim Terpadu Kota Semarang Tahun 2010 – 2020, maka reformulasi kebijakan baru dapat dirumuskan sebagai berikut:

**a. Dalam Dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 - 2021**

- 1) Perlunya Pemerintah Kota Semarang secara eksplisit dan tegas memasukan isu-isu jender kaitannya dengan perubahan iklim di dalam deskripsi atau gambaran umum terkait ancaman perubahan iklim yang dihadapi oleh Kota Semarang.
- 2) Perlunya Pemerintah Kota Semarang secara eksplisit dan tegas memasukan isu-isu jender kaitannya dengan perubahan iklim di dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah, dimana salah satunya menggunakan instrumen *gender budgeting* sehingga kepentingan dan kebutuhan spesifik jender dapat terakomodir di dalam penganggaran.
- 3) Perlunya Pemerintah Kota Semarang secara eksplisit dan tegas memasukan isu-isu jender kaitannya dengan penjelasan mengenai permasalahan dasar terkait perubahan iklim.
- 4) Perlunya Pemerintah Kota Semarang secara eksplisit dan tegas memasukan isu-isu jender kaitannya dengan perubahan iklim di dalam penjelasan mengenai tagline “SEMARANG TANGGUH”, sehingga isu-isu jender dijadikan sebagai salah satu indikator SEMARANG TANGGUH tersebut.
- 5) Perlunya Pemerintah Kota Semarang secara eksplisit dan tegas memasukan isu-isu jender kaitannya dengan perubahan iklim di dalam strategi dan arah kebijakan terkait perubahan iklim.
- 6) Perlunya Pemerintah Kota Semarang secara eksplisit dan tegas memasukan isu-isu jender kaitannya dengan perubahan iklim di dalam kebijakan umum dan program terkait perubahan iklim, sehingga kebijakan umum dan program terkait perubahan iklim memuat

“pengurangan resiko dampak perubahan iklim bagi kelompok-kelompok rentan berbasis gender”.

- 7) Perlunya Pemerintah Kota Semarang secara eksplisit dan tegas memasukan isu-isu gender kaitannya dengan perubahan iklim di dalam penetapan indikator kinerja daerah dan kebutuhan pendanaan terkait perubahan iklim, sehingga indikator kinerja daerah dan kebutuhan pendanaan memuat indikator mengenai “berkurangnya resiko dampak perubahan iklim bagi kelompok-kelompok rentan berbasis gender”.

**b. Dalam Dokumen Strategi Perubahan Iklim Terpadu Kota Semarang Tahun 2010 – 2020**

- 1) Perlunya Pemerintah Kota Semarang secara eksplisit dan tegas memasukan isu-isu gender kaitannya dengan perubahan iklim di dalam gambaran umum tentang perkiraan dampak dan risiko perubahan iklim.
- 2) Perlunya Pemerintah Kota Semarang secara eksplisit dan tegas memasukan isu-isu gender kaitannya dengan perubahan iklim di dalam tujuan dan strategi perubahan iklim, sehingga di dalam deskripsi tentang tujuan dan strategi pembangunan daerah telah secara spesifik mendeskripsikan tangguh terkait dampak perubahan iklim perspektif gender.
- 3) Perlunya Pemerintah Kota Semarang secara eksplisit dan tegas memasukan isu-isu gender kaitannya dengan perubahan iklim di dalam kebijakan umum dan indikasi program.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dirumuskan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

### **1. Bagi Akademisi dan Ahli**

Secara teoritis, berdasarkan penelitian ini, maka seyogyanya para akademisi dan ahli di dalam melakukan studi terkait dampak perubahan iklim perlu melihat sudut pandang dari bidang lain seperti studi jender. Hal ini dikarenakan kejadian-kejadian terkait perubahan iklim tidak hadir pada ruang kosong, melainkan hadir di tengah ruang yang di dalamnya terdapat relasi sosial (relasi jender), sehingga antar keduanya dapat saling mempengaruhi. Pada saat yang sama, studi tentang jender yang selama ini fokus pada aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama, juga perlu mempertimbangkan aspek lain seperti lingkungan hidup, termasuk persoalan perubahan iklim.

### **2. Bagi Pemangku Kebijakan**

Secara praksis, berdasarkan penelitian ini, maka seyogyanya para pemangku kebijakan, yakni eksekutif dan legislatif di dalam merumuskan suatu kebijakan terkait perubahan iklim agar tidak hanya terpusat pada persoalan perubahan iklim itu sendiri, tetapi juga perlu melihat aspek-aspek lain yang saling kait mengait seperti masalah kesetaraan dan keadilan jender. Dengan mempertimbangkan aspek jender dalam kaitannya dengan dampak perubahan iklim, maka rumusan kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif jender.

Kebijakan yang responsif jender tersebut merupakan bagian penting bagi peningkatan kualitas kebijakan yang dihasilkan, karena semakin tinggi level kesadaran jender yang dimiliki oleh suatu kota, maka akan semakin tinggi pula kualitas kebijakan perubahan iklim yang dimiliki oleh kota tersebut. Sebaliknya, kegagalan memasukan perspektif jender dalam kebijakan perubahan iklim akan semakin menurunkan level kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, juga pada hakikatnya akan semakin menambah beban dan resiko bagi kelompok-kelompok jender yang lebih rentan pada saat terpapar dampak perubahan iklim.

Dengan demikian, maka setiap pemangku kebijakan seyogyanya memahami bahwa kebijakan perubahan iklim yang responsif gender sangat penting bagi kapasitas adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat yang terpapar dampak. Semakin minim kapasitas adaptasi yang dimiliki maka semakin menyebabkan kelompok gender tertentu menjadi semakin rentan.

### **3. Bagi Masyarakat**

Berdasarkan penelitian ini maka seyogyanya warga masyarakat perlu sejak awal memiliki pemahaman yang cukup terkait perubahan iklim (*climate literacy*), baik kaitannya dengan perubahan iklim itu sendiri maupun terkait dengan isu-isu lain yang saling kait mengkait dengan perubahan iklim, seperti isu-isu gender. Pada konteks praksis, masyarakat juga perlu membentuk *Gender Vocal Point* di tingkat kelurahan untuk mengawal agar kebijakan dan program responsif gender.

Selanjutnya, masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) perlu melibatkan diri di dalam perumusan-perumusan kebijakan terkait perubahan iklim, baik melalui Musyawarah Rembug Pembangunan (MUSREMBANG) tingkat kelurahan maupun melalui forum-forum lain. Dalam pelibatan tersebut, masyarakat perlu mengawal apakah isu-isu gender telah dipertimbangkan atau belum di dalam perumusan kebijakan dan program. Jika belum dipertimbangkan, maka masyarakat perlu melakukan advokasi untuk memastikan bahwa isu-isu gender telah masuk di dalam pertimbangan-pertimbangan perumusan kebijakan dan program.

